

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Implementasi

Istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pelaksanaan atau penerapan. Implementasi biasanya berkaitan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Horn dalam Solichin (2008:135) menyebutkan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individual/pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian dan tujuan tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan

Sabatier (1986) dalam Purwanto dan Sulistyastuti (2012:19) menyebutkan, ada enam variabel utama yang dianggap memberi kontribusi keberhasilan atau kegagalan implementasi. Enam variabel tersebut adalah :

1. Tujuan atau sasaran kebijakan yang jelas dan konsisten.
2. Dukungan teori yang kuat dalam merumuskan kebijakan.
3. Proses implementasi memiliki dasar hukum yang jelas sehingga menjamin terjadi kepatuhan para petugas di lapangan dan kelompok sasaran.
4. Komitmen dan keahlian para pelaksana kebijakan.
5. Dukungan para stakeholder.
6. Stabilitas kondisi sosial, ekonomi dan politik.

1.2 Pengertian Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-

undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan dan Kebijakan yang dibuat oleh Lembaga-Lembaga Pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Menurut Solichin Abdul Wahab dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara (2001) dalam (Wahab 2001:65) mengemukakan pendapatnya mengenai Pelaksanaan atau implementasi sebagai berikut : Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

1.2.1 Kriteria implementasi

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, implementasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan dihubungkan oleh mekanisme untuk mencapai tujuan tertentu. Merujuk pada pengertian pelaksanaan, mengevaluasi, tujuan pelaksanaan membutuhkan kriteria-kriteria yang harus di tentukan untuk mendorong implementasi program pemberdayaan Masyarakat melalui pelatihan ketrampilan dasar adalah:

1. Tujuan utama pelaksanaan adalah untuk mencapai suatu perencanaan yang matang, baik secara individu maupun secara tim.
2. Memeriksa dan mendokumentasikan prosedur dalam pelaksanaan rencana atau kebijakan.
3. Mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam rencana atau kebijakan yang dirancang.
4. Untuk menentukan kapasitas masyarakat untuk melaksanakan kebijakan atau rencana sebagaimana dimaksud.
5. Untuk menentukan seberapa sukses suatu kebijakan atau rencana telah dirancang untuk meningkatkan atau meningkatkan kualitas.

1.2.2 Model Implementasi

Untuk mengkaji lebih baik suatu implementasi kebijakan publik maka perlu diketahui variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu, diperlukan suatu model kebijakan guna menyederhanakan pemahaman konsep suatu implementasi kebijakan. Terdapat banyak model yang dapat dipakai untuk menganalisis sebuah implementasi kebijakan, namun kali ini yang saya bagikan adalah model implementasi yang dikemukakan oleh George Edward III.

George Edward (2011) dalam (Widodo (2011:96–110) melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Oleh karena itu, Edward menegaskan bahwa dalam studi implementasi terlebih dahulu harus diajukan dua pertanyaan pokok yaitu :

1. Apakah yang menjadi prasyarat bagi implementasi kebijakan?
2. Apakah yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan?

1.3 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pemberdayaan adalah konstruksi bersama oleh banyak disiplin ilmu, antara lain: pengembangan masyarakat, psikologi, pendidikan, ekonomi, dan studi tentang gerakan sosial dan organisasi, antara lain. Bagaimana pemberdayaan dipahami akan berbeda di antara perspektif dari masing-masing disiplin ilmu tersebut.

Sumodiningrat (1997) mengemukakan bahwa dalam suatu pemberdayaan sedikitnya terdapat tiga aspek yang diantaranya, yaitu:

1. Pemberdayaan dilakukan untuk menciptakan kondisi yang dapat untuk mengembangkan segala potensi masyarakat
2. Pembedayaan dilakukan untuk memperkuat potensi mengenai modal sosial, sehingga dapat meningkatkan mutu kehidupannya
3. Pemberdayaan dilakukan untuk mencegah dan melindungi berbagai bentuk intimidasi yang mengentaskan ketertindasan dalam berbagai sendi.

1.3.1 Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah proses untuk memperoleh peluang dasar bagi orang-orang yang terpinggirkan, baik secara langsung oleh orang-orang itu, atau melalui bantuan orang lain yang tidak terpinggirkan yang memiliki berbagi akses pada peluang-peluang tersebut.

Pemberdayaan atau bahasa inggris yaitu “empowerment” dapat diartikan sebagai proses memberikan kesempatan kepada seseorang atau lebih untuk berpikir, berbicara, bertindak, berkeputusan terkait dengan pekerjannya, sehingga pekerjaan lebih cepat, singkat, dan mudah.

1.3.2 Model Pemberdayaan

jalur bertahap yang dapat dilalui untuk pemberdayaan masyarakat. Peningkatan keberdayaan masyarakat dapat dicapai melalui proses pemberdayaan karena adanya peran modal manusia dan modal fisik. Temuan ini memberikan solusi bahwa modal usaha yang meliputi modak fisik dan modal manusia tidak secara otomatis menghasilkan keberdayaan masyarakat. Pengembangan modal fisik akan menstimulasi pengembangan modal manusia yang akan mendukung proses pemberdayaan yang pada akhirnya akan meningkatkan keberdayaan Masyarakat seperti gambar di bawah ini.

1.3.3 Karakteristik Pemberdayaan

karakteristik adalah suatu pernyataan tentang kebijakan yang dijadikan tujuan pelaksanaan pemberdayaan Masyarakat dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan secara konsisten, karakter pemberdayaan sebagai berikut

1. Mengerjakan kegiatan pemberdayaan harus sebanyak mungkin harus melibatkan masyarakat untuk mengerjakan/ menerapkan sesuatu.
2. tujuan kegiatan pemberdayaan harus memberikan baik dan bermamfaat.
3. setiap kegiatan kompak dan saling bekerja sama

pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik, Alfabeta, 2015), pemberdayaan harus dikaitkan dengan kegiatan yang lain. Dahama dan Bhatnagar menjelaskan prinsip-prinsip pemberdayaan yaitu.

Minat dan kebutuhan, artinya pemberdayaan akan efektif jika selalu mengacu pada minat dan kebutuhan masyarakat.

1. Organisasi masyarakat bawah, artinya pemberdayaan akan efektif jika mampu melibatkan/ menyentuh organisasi masyarakat bawah.
2. Keragaman budaya, artinya pemberdayaan harus memperhatikan adanya keragaman budaya
3. Kerjasama dan partisipasi, artinya pemberdayaan hanya akan efektif jika mampu menggerakkan masyarakat untuk kerjasama dalam melaksanakan program-program pemberdayaan yang telah dirancang.

1.3.4 Prinsip-Prinsip Pemberdayaan

Terdapat beberapa prinsip utama dalam pemberdayaan masyarakat. Disarikan dari buku sosiologi Kenali Dirimu terbitan Kemdikbud (2020) serta buku Pemberdayaan Masyarakat di

Lahan Gambut (2005: 8-9), berikut prinsip-prinsip dalam pemberdayaan masyarakat.

1. Kesetaraan

Prinsip ini merupakan hal utama dalam proses pemberdayaan masyarakat. Ini karena kesetaraan (kesejajaran) antara masyarakat dan lembaga yang melakukan program pemberdayaan berpotensi memaksimalkan pengembangan mekanisme berbagi pengetahuan, pengalaman, dan keahlian satu sama lain. Prinsip kesetaraan diharapkan bisa mendorong proses saling belajar di antara dua belah pihak.

2. Partisipasi

Prinsip partisipasi penting untuk menstimulasi kemandirian masyarakat. Dengan penerapan prinsip ini, program pemberdayaan komunitas harus bersifat partisipatif. Artinya program pemberdayaan itu direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat sendiri.

3. Keswadayaan atau Kemandirian

Prinsip keswadayaan menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini memandang orang miskin sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit (the have little).

4. Berkelanjutan

Program pemberdayaan sebaiknya dirancang secara berkelanjutan. Pada awal pelaksanaan, peran pendamping akan lebih dominan dan kemudian diharapkan terus berkurang seiring dengan adanya peningkatan kemampuan masyarakat dalam menangani kegiatan atau urusannya sendiri.

1.4 KETRAMPILAN DASAR

keterampilan dasar mengajar adalah kemampuan atau keterampilan yang bersifat khusus yang harus dimiliki oleh

pengajar agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan juga secara profesional, supaya masyarakat bisa memahami dengan baik dan lancar sesuai dengan perencanaan sumber daya manusia.

keterampilan dasar ini disebutkan memiliki dua kemampuan utama yang wajib dimiliki seorang pengajar dari dinas pertanian agar disebut menguasainya dengan baik. yaitu:

- a. menguasai materi kemampuan pertama yang perlu dimiliki seorang pengajar adalah menguasai materi. sehingga wajib paham dulu apa yang akan disampaikan ke masyarakat /petani kopi, dan stroberi, baru kemudian proses penyampaian bisa dilakukan. sebab mengajar bukan sekedar membaca ulang isi buku di hadapan masyarakat tani. melainkan lebih dari itu. seorang pengajar harus paham materi agar bisa memberi penjelasan dengan jelas, menyebutkan contoh nyata di lapangan, dll.
- b. menguasai metodologi Kemampuan kedua di dalam keterampilan dasar seorang pengajar adalah menguasai metodologi. Artinya, seorang tenaga pengajar memiliki kebutuhan dan kewajiban untuk memiliki penguasaan yang baik terhadap tata cara penyampaian materi.

1.4.1 Pengertian ketrampilan dasar

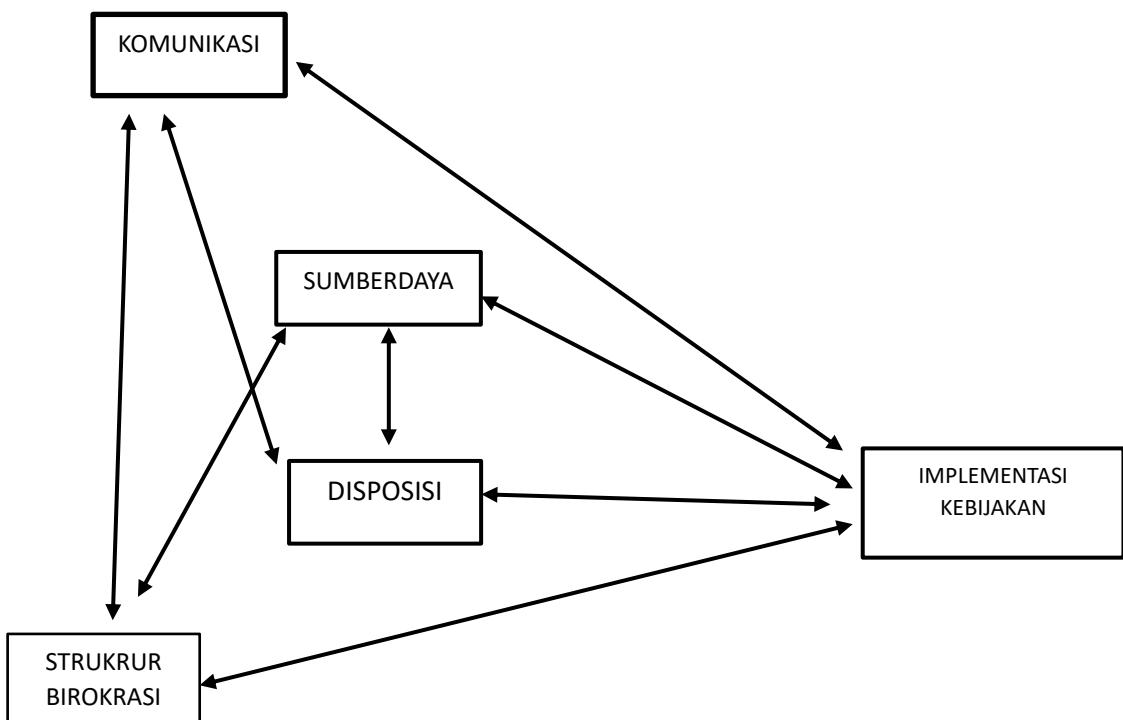
Dalam kesimpulan, pengertian SDM mencakup potensi, keterampilan, pengetahuan, dan keahlian individu atau kelompok dalam suatu organisasi. Pengelolaan dan pengembangan SDM menjadi faktor kunci dalam mencapai keunggulan kompetitif. Perusahaan perlu memiliki kebijakan dan praktik yang jelas dalam mengelola SDM serta menginvestasikan sumber daya untuk pengembangan karyawan. Pengertian SDM juga berkaitan dengan aspek keberagaman dan inklusivitas dalam organisasi. Dengan memahami pengertian SDM secara mendalam, perusahaan

dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh setiap individu dan mencapai kesuksesan jangka panjang.

1.5 KERANGKA PIKIR

Berdasarkan uraian diatas maka implementasi program pelatihan pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut :

Bagan : 2.1 kerangka pikeir



Sumber kerangka pikir :George C. Edward III

model implementasi kebijakan pumblk yang di kemukakan oleh edward menunjuk empat fariabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi

A. komunikasi

Yaitu menunjukkan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dengan para kelompok sasaran

B. sumber daya

Yaitu menunjukkan setiap kebijakan harus dilakukan oleh sumber daya yang memadai baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial.

C. disposisi

Yaitu menunjukkan karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan atau program.

D. Struktur Birokrasi

Menunjukkan bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan.